

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologis

Kriminologis yang merupakan kata dari *crimes* dan *logo*. *Crime* yang diartikan sebagai kejahatan sedangkan *logod* sebagai ilmu pengetahuan dari bahasa latin. Dari kata kriminologis dapat disampaikan dengan arti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kriminologis yang merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki suatu gejala kejahatan yang sangat luas berdasarkan pada pengalaman contohnya ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis yang memperhatikan suatu gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.

5

Menurut ahli Bonger, merupakan pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki sebuah gejala kejahatan yang memiliki arti seluasnya berhubungan dengan kejahatan. Berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbulnya serta melenyap dari kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi dari sekeliling, pribadi dari penjahat.⁶

Menurutnya pembagian ini ada beberapa macam yaitu:

1. Antropologis, tentang manusia jahat dimana ilmu pengetahuan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang berniat jahat.

⁵ Bonger, W.A. 2014. *Pengantar Tentang Kriminologis*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm 21.,

⁶ Ibid.,

2. Sosiologis kriminal, kejahatan sebagai satu gejala orang sekeliling. Dimana masyarakatnya beranggapan tahu tentang jawaban sampai mana sebab kejahatan yang ada didalam sekelilingnya.
3. Psikologis, mempelajari tentang kejahatan yang dilihat dari suatu sudut kejiwaan. Dan terakhir,
4. Penologi, ilmu yang mempelajari ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukum.⁷

Kriminologis khususnya sebagai pengaruh pikiran yang kritis mengarah studi sebuah proses kriminalisasi, proses pembuatan maupun bekerja dalam perundang-undangan. Memberikan beberapa saran besar dibidang pradilan pidana yaitu sebuah penelitian tentang penegak hukum yang dapat digunakan dalam memperbaiki pekerjaan dari aparat hukum, dari memberikan perhatian terhadap hak-hak tersangka, birokrasi penegak hukum, perbaikan terhadap sistem perundang-undangan pada sekarang ini.⁸

Menurut Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi menurutnya, objek kriminologi meliputi:

⁷ Ibid.

⁸ I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta, hlm 1.

- Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
- Pelaku kejahatan dan;
- Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan ataupun motif dan kategori pelakunya. Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan akan non legal discipline. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang maupun. Pelaku kejahatan di bahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan dengan motif dan kategori pelaku kejahatan. Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁹

Berdasarkan pemikiran bebrapa para ahli, singkatnya pengertian kriminologi menurut sebagai berikut:

⁹ Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books, 2010.

a. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

b. Shuterland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

c. Wolfgang, Savitz dan Johnstson

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari pola-pola dan faktor yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.¹⁰

B. Tinjauan Umum Viktimologis

Viktimologis merupakan pelengkap atau penyempurna dari terori-teori yang ada yang berusaha menjelaskan suatu masalah yang telah terjadi dari berbagai kejahatan atau penimbunan suatu korban tindak kejahatan, menurut proporsi yang sebenarnya seperti dimensional yang bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan serta kepedihan yang ada didunia saat ini.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Santoso, Topo dan Eva. 2011. *Viktimologi*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 11.

Merupakan suatu ilmu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri atas dasar hubungan penjahat dengan korban atau *criminal victim relationship*. Hal itu terjadi, karena kejahatan atas interaksi penjahat dan korban sekaligus adanya pengakuan peranan dan tanggung jawab. Membahas peran dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan dimasyarakat serta bagaimana reaksi keliling terhadap masyarakat terhadap korban tindak kejahatan.¹²

Suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses- proses selanjutnya.¹³

Tujuan viktimologi adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa

¹² Ibid.

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta:Sinar Grafika, 2002.

aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.¹⁴

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengaki batkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁵

Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Tujuan viktimologi adalah:¹⁷

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.

¹⁷ Ibid.

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.¹⁸

Menurut Arief Gosita, beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:

- a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi

¹⁸ Rena yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.¹⁹

Adapun dari penelitian viktimologis adalah korban, dalam hal ini merupakan bagian dari tindak pidana, hubungan korban, penjahat, dan penanan serta posisi korban dalam proses peradilan pidana. Tujuan dari studi viktimologis yaitu:

1. Mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan korban.
2. Menganalisis hubungan sebab akibat viktimisasi.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1989.

3. Mencari tahu sistem yang dapat digunakan untuk mengurangi penderitaan manusia pada saat ini.²⁰

Adapun pengertian dari yang dijabarkan lebih luas oleh Abdussalam mengenai korban perseorang, institusi, lingkungan, hidup masyarakat, bangsa dan negara, antara lain:

- a. Korban perseorang, setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
- b. Korban institusi, setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintahan dan kebijakan swasta serta dari bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuhan, binatang, manusia dan sekelilingnya serta jasad hidup yang masih tumbuh berkembang akan kelestariannya yang sangat tergantung pada lingkungan alam.
- d. Korban masyarakat dan bangsa serta negara, masyarakat diperlakukan dengan cara diskriminatif tidak adil yang mengalami tumpang tindih dari pembagian hasil pembangunan dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak lebih baik dari tahun ke tahun.²¹

²⁰ Rena, Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta, hlm 9

²¹ Abdussalam. 2010. *Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta, hlm 10.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata tersebut oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delict, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*.²²

Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang dasar sementara tahun 1951 khususnya dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

²² Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMMPress, 2012.

5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-undang.²³

misalnya:

- a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Permasalahannya Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang merupakan Kejahatan.

Dari pengertian doktrin hukum pidana dikenal adanya dua pandangan pidana yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Monistik merupakan pandangan yang memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Sedangkan dualistik, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.²⁴

D. Tinjauan Umum Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul artinya segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

mengenai dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau mengosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya. Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang lebih disingkat KUHP, sudah terdapat penambahan kata “Persetubuhan” disamping kata perbuatan cabul. Tetapi pengertian cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh karena persetubuhan berarti perpaduan alat kelamin-laki-laki dan perempuan, yang disyaratkan maksudnya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk sperma sudah keluar kejadian ini bukan persetubuhan namanya tetapi perbuatan cabul.²⁵

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor (seperti kesopanan), perbuatan yang buruk atau melanggar kesusilaan, perbuatan tak senonoh. Perbuatan cabul yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berarti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam KUHP dijelaskan perbuatan cabul ini adalah segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.²⁶

Beberapa bentuk pencabulan cukup beragam, istilah tentang pencabulan antara lain:

1. Exhibitionism, sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.

²⁵ Fatmawati, *Pencabulan Anak Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2017.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

2. Voyeurism, mencium seseorang dengan bernafsu.
3. Fondling, mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.²⁷

Dalam KUHP Buku II Bab XIV pasal 294 ayat (1) yang dimana acamannya hukuman berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yang mana sudah diatur tentang pencabulan tersebut. Tetapi apabila lakukan bersama-sama atau kedua belah pihak namun yang diberikan hukuman hanya seorang yang dewasa atau sudah memenuhi umur dalam Undang-undang. Karena adanya perlawanan dari pihak korban dan dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan, maka diatur dalam pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”²⁸

Menurut Simon dari bukunya, *ontuchtige handelinge* atau cabul adalah tindakan yang berkenan dengan kehidupan suatu bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengancara yang bersifat bertentangan dengan pandangan umum kesusilaan.²⁹

Menurut *The National Center On Child Abuse and Neglect US*, *sexual assault* atau definisi pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh

²⁷ Yuniar Tanti, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 2012.

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

²⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1997.

pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan kendali atas korban.³⁰

Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, yang membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seseorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat kelamin orang dewasa kepada anak. Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian sebuah kata dari “Pencabulan” yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.³¹

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya atau kenikmatan seksualnya. Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis-jenis pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana antara lain:³²

1. Pencabulan dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.³³

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Op.cit, Redaksi Sinar Grafika.

³³ Ibid.

2. Pencabulan dalam keadaan tidak berdaya. Pada pasal 290 KUHP, seseorang dapat dipidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.³⁴
3. Pencabulan dengan cara membujuk, dalam pasal 290 KUHP juga dapat dipidana dengan pidana selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.³⁵
4. Pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan, dalam pasal 293 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakukannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan pencabulan itu dilakukan pada dirinya. Dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.³⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.³⁷

Adapun berbagai pengertian anak menurut Undang-Undang, antara lain:

1. Menurut KUHP pada pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.³⁸
2. Menurut KUHPerdara batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”³⁹
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;⁴⁰

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*.

³⁸ Op.cit, Redaksi Sinar Grafika.

³⁹ Subekti R, dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2012.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

4. Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun”
5. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴¹
6. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang ,enjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
7. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

F. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁴²

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁴³

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴⁴

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 2 KUHPerduta yang berbunyi:

⁴² Ibid.

⁴³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, Halaman 5.

⁴⁴ Ibid.

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki. Bila telah mai sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”⁴⁵

Jadi, setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam buku Hukum Perdata Indonesia, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan dengan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁴⁵ Op.cit Subekti R, dan R, Tjitrosudibio